

Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>

ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia

Haira Zulfia¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang -Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang

E-mail: hairanadira@gmail.com¹, aldri@fis.unp.ac.id²,
lincemagriasti@fis.unp.ac.id³. No HP. 081363631716

Abstract: This research aims to analyze the issues surrounding the implementation of special autonomy in relation to the Human Development Index (HDI). The article is analyzed using a literature review approach, involving the collection of relevant information and sources related to the discussed topic. The data analysis is conducted through content analysis. The findings of the literature review reveal several issues regarding the implementation of special autonomy in Papua, particularly in the context of human development index. Some of the identified problems in this study include the discontinuation of special autonomy funds in the government bureaucracy, inadequate healthcare services, limited infrastructure and facilities, central government's policy discrimination towards the region, and low economic growth following the implementation of special autonomy

Keywords: HDI; Papua; Special Autonomy

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM). Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan sumber yang relevan terkait dengan topik yang dibahas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis isi. Hasil dari studi literatur ini mengungkap beberapa problematika pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain terhentinya dana otonomi khusus di birokrasi pemerintahan, kurangnya layanan kesehatan yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, diskriminasi kebijakan pusat terhadap daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah setelah pelaksanaan otonomi khusus.

Kata kunci: IPM; Otonomi Khusus; Papua

PENDAHULUAN

Kebijakan penerapan otonomi khusus tentu tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan daerah tersebut serta pendesentralisasian kewenangan (politik), desentralisasi kelembagaan. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang memiliki sifat khusus atau istimewa, yang diatur melalui undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). "Ini berarti bahwa konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B UUD 1945, memberikan jaminan terhadap praktik penyelenggaraan otonomi khusus di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa. Dalam konteks ini, pemerintah daerah yang memenuhi syarat dapat diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan-urusan pemerintahannya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus atau istimewa daerah tersebut.

Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan, pluralisme di antara wilayah-wilayah diakui dan dijamin keberadaannya. (Putra 2018). Salah satu contoh implementasinya adalah melalui pemberian perhatian khusus dari pemerintah pusat kepada Provinsi Papua, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang memberikan jaminan dan fasilitas politik untuk penyelenggaraan pemerintahan khusus di Papua.

Pemberian otonomi khusus kepada Papua bertujuan pertama untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut sehingga Papua dapat sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. (Meteray 2016), Kedua sebagai solusi penyelesaian konflik di Papua yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua (Suriadin 2022).

Namun sejauh ini penerapan kebijakan otonomi khusus di Papua masih jauh dari harapan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya permasalahan yang terjadi di Papua pertama tingginya angka kemiskinan di Papua sebagaimana dikutip dari pernyataan kepala BPS Margo Yuwono pada

September tahun 2022 tingkat kemiskinan di papua mengalami kenaikan 0,21% menjadi 20,10 juta jiwa (CNBC Indonesia 16/01/2023), kedua terjadinya ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang di mana angka tersebut berada pada level yang cukup tinggi. (Wenda, Tambas et al. 2022, Yusnanda 2022), ketiga tingginya harga barang pokok di papua, keempat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di papua berdasar data BPS tahun 2019 sebesar 90,36%.

Sejauh ini studi terdahulu tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Papua cenderung lebih mengarahkan pada hubungan internasional dan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus (Negara, Paendong 2022, Pugu, Lumentut et al. 2022), kedua lebih mengarahkan hubungan budaya dengan otonomi khusus (Banga and Roragabar 2022, Runturambi and Waterpauw 2022), ketiga cenderung lebih mengarahkan pada pelaksanaan otonomi khusus di bidang ekonomi dan Pendidikan (Fahrudin 2022, Ham and Octaviani 2022, Kombado 2022, Nursifah, Rugaiyah et al. 2023).

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu mengenai pelaksanaan otonomi khusus. Secara umum tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi pemerintah papua dalam melaksanakan otonomi khusus. Sedangkan secara khusus tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM).

Otonomi khusus Papua sebagai tindakan pengakuan dan pemberian wewenang khusus, Provinsi Papua diberikan otonomi khusus untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan inisiatif mereka sendiri, dengan mempertimbangkan aspirasi dan hak-hak dasar yang dimiliki oleh masyarakat Papua. Penggunaan istilah "otonomi khusus" mengindikasikan perlakuan istimewa yang diberikan, di mana Provinsi Papua mendapatkan prioritas dan dukungan yang lebih besar daripada daerah lainnya.

Implementasi kebijakan terkait Papua dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua, yang juga dikenal sebagai UU otsus. UU ini merupakan respon terhadap ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap kebijakan sentralistik pada masa Orde Baru. UU otsus sejalan dengan konsep desentralisasi yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Dalam era reformasi yang ditandai oleh semangat demokrasi dan kebebasan, muncul suara yang kuat untuk mendapatkan kemerdekaan Papua, baik di tingkat lokal maupun nasional, bahkan mencapai perbincangan internasional.

Indeks pembangunan masyarakat merupakan isu strategi sebagai pengukuran untuk mengevaluasi tingkat kemajuan pembangunan berdasarkan aspek-aspek penting dalam kualitas hidup. IPM dihitung dengan mempertimbangkan data yang mencakup empat komponen utama, yaitu angka harapan hidup sebagai indikator kesehatan, tingkat melek huruf dan durasi pendidikan sebagai penanda pendidikan, serta daya beli masyarakat yang tercermin dalam pengeluaran perorangan sebagai pendekatan untuk mengukur pembangunan yang menghasilkan kehidupan yang layak. Kajian ini membahas secara singkat tentang otonomi khusus dalam meningkatkan indeks pembangunan di Papua.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tentang Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia mengambil lokasi di Provinsi Papua. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan selain provinsi aceh, yang mendapatkan otonomi khusus adalah provinsi papua. Tipe penelitian dan jenis data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi literature yang bersandar pada data sekunder yang berupa dokumen, karya ilmiah.

Proses penelitian berlangsung satu setengah bulan mulai dari dari mngumpulkan sumber putaka, membaca sumber pustaka, melakukan pencatatan dan penyajian kajian pustaka. Analisis Data: menggunakan analisis isi (Content Analysis) adalah suatu pendekatan penelitian yang melibatkan analisis yang teliti terhadap isi informasi tertulis atau cetak dalam media massa. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis komunikasi, seperti artikel surat kabar, publikasi ilmiah, laporan berita radio, iklan televisi, dan dokumen-dokumen lainnya. Pendeka tan analisis isi ini membantu dalam memahami dan menganalisis konten tulisan sebelumnya sebagai dasar

penelitian. Analisis isi juga digunakan dalam konteks diskusi untuk membantu penulis memahami dan menganalisis kebenaran tulisan-tulisan sebelumnya sebagai dasar penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari tinjauan pustaka ini melibatkan analisis isi dari berbagai jurnal sebagai bagian dari upaya untuk mengidentifikasi temuan baru. Analisis tersebut bertujuan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan topik yang dipilih oleh peneliti. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jurnal-jurnal yang terkait dengan kebijakan otonomi khusus dan Indeks Pembangunan Manusia.

Hasil penelitian dari (Fanggidae and Yuanjaya 2016) menemukan bahwa rendahnya kualitas Pendidikan dipapua disebabkan oleh sumber daya yang ada tidak dapat dilaksanakan karena terhenti di birokrasi dan pemerintahan seperti dana pendidikan. Hasil penelitian(KORAIN, KAUNANG et al. 2020) menemukan bahwa gagalnya penerapan kebijakan dana otsus disebabkan oleh sumber daya atau implementator itu sendiri yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Penelitian dari (Tabuni, Rumapea et al. 2016) menunjukkan bahwa kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menyebabkan gagalnya penerapan otsus dibidang Pendidikan. Hasil penelitian (Wenda, Mamentu et al. 2017) ditemukan bahwa alokasi dana pendidikan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja anggaran. Penyebabnya adalah kinerja pengguna anggaran yang tidak optimal.

Penelitian (Alfasisromarakap, Ahman et al. 2021) mengindikasikan bahwa terdapat potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik dari segi kekayaan alam maupun potensi manusia, dalam pengembangan sektor pendidikan. Akibatnya, terdapat kendala dalam pengelolaan pendidikan di era otonomi khusus.

Penelitian dari(Wenda 2015) mengemukakan bahwa kondisi masyarakat dipapua masih jauh dari rata-rata masyarakat di indonesia hal tersebut dikarenakan minimnya sarana dan prasarana. Hasil penelitian dari(Howay, Jeddawi et al. 2019) Program pelayanan kesehatan di Kabupaten Sorong

menghadapi kendala dalam mencapai optimalisasi karena kekurangan sarana dan prasarana, tenaga medis, obat-obatan serta belum optimalnya pelayanan Kesehatan. Selain itu, tingkat kualitas kesehatan di wilayah tersebut juga belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Penelitian Dari (KADAM and SETIADI 2020) menemukan bahwa kebijakan otonomi khusus memiliki dampak positif terhadap perkembangan fisik dan non-fisik dalam sektor kesehatan. Namun, tetap ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, kesesuaian, dan penggunaan kebijakan tersebut.

Penelitian (Asti, Tambing et al.) menemukan bahwa Pelayanan kesehatan di Papua masih belum optimal dikarenakan ketidakmerataan fasilitas kesehatan serta kurangnya jumlah dokter dan dokter spesialis di Provinsi tersebut.

Hasil Penelitian (Sitorus 2018) mengemukakan bahwa pada saat sekarang kehidupan masyarakat papua belum setara dengan pendatang yang yang dipapua dimana ekonomi papua lebih dikuasai oleh pendatang. Hasil penelitian (Ismail 2015) menemukan bahwa kondisi ekonomi di Provinsi Papua masih dalam kategori lemah hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal usaha yang dialami oleh masyarakat Papua. Selain itu, peralatan yang digunakan dalam kegiatan ekonomi masih sederhana, produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup rendah., dan sulitnya akses pasar menjadi kendala yang dihadapi. Selain itu, terdapat kekurangan semangat dan motivasi berwirausaha, terutama di kalangan masyarakat atau pelaku ekonomi asli Papua.

Penelitian (Indrawati, Sarfiah et al. 2020) menemukan bahwa kemiskinan pada masyarakat papua disebabkan oleh tidak meratanya pendistribusian pendapatan masyarakat. Hasil penelitian (Munawaroh 2020) menunjukkan bahwa pembangunan infra struktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dipapua, namun sejauh ini pembangunan yang dilakukan pemerintah belum optimal terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, jalan dan tenaga kerja.

a. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Kondisi Papua sebagai daerah dengan status otonomi khusus dalam sejarahnya telah menghadapi berbagai permasalahan yang sangat

mengkhawatirkan, terutama terkait dengan kesenjangan sosial. Fenomena ini dipicu oleh adanya perasaan cemburu sosial di antara masyarakat, yang pada akhirnya memicu terjadinya konflik akibat ketimpangan dalam pembangunan yang tidak merata. Untuk mengatasi situasi tersebut, salah satu langkah yang dapat diambil yakni melalui peningkatan IPM untuk mensejahterakan masyarakat Papua, namun kenyataannya sampai saat sekarang IPM di Papua merupakan yang paling terendah di antara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal tersebut dilihat dari tiga indikator IPM yakni indikator Pendidikan, indikator Kesehatan dan indikator ekonomi.

b. Pendidikan

Untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendekatan ini penting karena pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk individu agar memiliki sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektual yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang terampil, cerdas, dan memiliki moralitas yang baik, sehingga mampu bersaing secara global dengan masyarakat lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu perlu adanya pemerataan pada sistem pendidikan di Indonesia (Kurniawati 2022). Namun sayangnya pada saat sekarang justru terjadinya ketimpangan pada sistem pendidikan di Indonesia dimana secara umum, sistem Pendidikan di wilayah Papua lebih tertinggal dibandingkan wilayah Indonesia lainnya.

Di wilayah Indonesia bagian Timur, masih banyak anak-anak yang menghadapi kendala dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Menurut data BPS tahun 2021 hampir 33,58% masyarakat Papua tidak bersekolah. Hal ini menandakan bahwa Pendidikan di Papua masih sangat rendah hal ini tentu berdampak pada indeks pembangunan masyarakat Papua. Dari hasil analisis beberapa riset ditemukan beberapa permasalahan Pendidikan yang terjadi di Papua diantaranya dana Pendidikan yang terhenti di birokrasi pemerintahan, kurangnya tenaga Pendidikan serta minimnya sarana dan prasarana.

c. Kesehatan

Masalah kesehatan di Papua menjadi pusat perhatian pemerintah yang paling serius hal ini dikarenakan terdapat beberapa masalah kesehatan

dipapua diantaranya buruknya layanan kesehatan, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana layanan Kesehatan sehingga berdampak pada sulitnya masyarakat papua dalam memperoleh layanan kesehatan yang memadai

Selain itu, situasi kesehatan di Papua masih mengkhawatirkan, terkait dengan kebijakan publik dalam layanan kesehatan di wilayah tersebut. Masalah lain juga datang dari kondisi geografis dan tingkat sosial ekonomi Papua yang unik, yang membuat akses dan ketersediaan layanan kesehatan semakin sulit di akses. Wilayah Papua yang cukup luas dan tersebar, menyebabkan terbatasnya infrastruktur Kesehatan yang menyebabkan Sebagian masyarakat kesulitan dalam mengakses layanan Kesehatan. Dengan adanya permasalahan Kesehatan ini tentu akan berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia di papua seperti yang dikemukakan oleh (Palenewen, Walewangko et al. 2018) Bahwa rendahnya kesehatan akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan dan kemiskinan di papua.

d. Ekonomi

Kegagalan pembangunan di Papua disebabkan karena adanya ketimpangan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konflik kepentingan para pendatang di Tanah Papua, terjadinya diskriminasi dan Pemanfaatan yang tidak adil terhadap SDA dan budaya papua. Meskipun diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus), tidak ada jaminan bahwa kesejahteraan dan pembangunan ekonomi akan tercapai bagi penduduk Papua.

Hal ini terlihat dari data dimana sebelum otsus diberlakukan di papua pertumbuhan ekonomi mencapai 20,18%. Sedangkan setelah otsus diberlakukan hingga tahun 2022 menurut BPIP provinsi Papua pertumbuhan ekonomi dipapua mencapai 14,38%. Dengan adanya data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di papua lebih tinggi dari sebelum dan sesudah Otonomi khusus. Hal ini merupakan suatu ironi karena dengan diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan ekonomi di Papua justru mengalami penurunan. Akibatnya, pertumbu han

ekonomi yang menurun ini berdampak pada semakin tingginya tingkat kemiskinan di Papua.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap problema tika pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah masalah yang perlu diatasi untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan di Papua. Studi literatur ini mengungkap beberapa isu krusial yang mempengaruhi implementasi otonomi khusus, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Pertama, dana otonomi khusus seringkali terhenti di birokrasi pemerintahan, menghambat alokasi sumber daya yang tepat dan efektif untuk pembangunan di Papua. Hal ini mempengaruhi sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat penting bagi perkembangan manusia di daerah tersebut.

Kedua, layanan kesehatan yang masih kurang memadai di Papua menjadi tantangan serius bagi peningkatan indeks pembangunan manusia. Akses yang terbatas, kurangnya fasilitas kesehatan, dan kualitas pelayanan yang rendah menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta penyebaran penyakit yang dapat dicegah.

Ketiga, diskriminasi kebijakan pusat terhadap daerah Papua yang menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan yang berkeadilan. Ketidaksetaraan dalam alokasi dana dan prioritas pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia menjadi sumber ketidakpuasan dan ketidakstabilan sehingga dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasisromarakap, A., et al. (2021). *"Hambatan dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di Era Otonomi Khusus Papua."* Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) 4(1): 141-153.(Jurnal Online)
- Asti, H. T., et al. *"Evaluasi Capaian Pemerataan Layanan Kesehatan yang Berkeadilan di Era JKN di Provinsi Papua."* (Proceeding)

- Banga, B. S. and Y. I. Roragabar (2022). "Budaya Kerja dari Perspektif Kristen dan Implementasinya dalam Realisasi Dana Otonomi Khusus di Papua." *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 4(2): 215-231. (Jurnal Online)
- Fahrudin, A. A. (2022). "Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua)." *Journal of Development Economic and Social Studies* 1(4). (Jurnal Online)
- Fanggidae, I. G. and P. Yuanjaya (2016). "Menelisik kinerja governance di daerah otonomi khusus Papua Barat." *Natapraja* 4(1). (Jurnal Online)
- Ham, U. and H. Octaviani (2022). "Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua." *Musamus Journal of Public Administration* 5(1): 065-078. (Jurnal Online)
- Howay, N. N., et al. (2019). "Implementasi Kebijakan Bidang Kesehatan Dalam Peningkatan Derajat Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat." *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 11(2): 129-139. (Jurnal Online)
- Indrawati, I., et al. (2020). "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019." *Dinamic* 2(4): 1068-1080. (Jurnal Artikel)
- Ismail, M. (2015). "Strategi pengembangan ekonomi rakyat di Provinsi Papua." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7(3): 251-260. (Jurnal Online)
- Kadam, A. and R. Setiadi (2020). *Analisis Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Terhadap Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat*, Universitas Diponegoro. (Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi)
- Kombado, I. (2022). *Pengaruh Otonomi Khusus Papua (OTSUS) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat (Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi dan Bidang Infrastruktur)*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi)
- KORAIN, F., et al. (2020). "Implementasi kebijakan dana otonomi khusus bidang pendidikan di kota sorong provinsi papua barat." *Jurnal Administrasi Publik* 5(86). (Jurnal Online)
- Kurniawati, F. N. A. (2022). "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia Dan Solusi." *Academy of Education Journal* 13(1): 1-13. (Jurnal Online)
- Meteray, B. (2016). "Dinamika Orang Papua Dalam Nieuw Guinea Raad (NGR) 1961 dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005 Di Tanah Papua." *Masyarakat Indonesia* 42(1): 77-103. (Jurnal Online)
- Munawaroh, S. (2020). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua*, Universitas Airlangga. (Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi)
- Negara, H. A. "Permasalahan Hubungan Antara Lembaga Pusat dan Lembaga Daerah (Studi Kasus Otonomi Khusus Daerah Papua)." (Proceeding)
- Nursofah, N., et al. (2023). "Analisis Implementasi Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan." *Global Education Journal* 1(3): 121-130. (Jurnal Online)

- Paendong, O. M. (2022). "Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Provinsi Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua." *Lex Privatum* 10(2). (Jurnal Online)
- Palenewen, T. O., et al. (2018). "Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap IPM dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18(4). (Jurnal Online)
- Pugu, M. R., et al. (2022). "Perempuan Pedesaan dan Disabilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat (Suatu Analisa Hubungan Internasional dalam Pelaksanaan Otsus Papua)." *Syntax Lit. J. Ilm. Indones* 7: 3464-3482. (Jurnal Online)
- Putra, R. (2018). "Prospek Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat Dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Soumatera Law Review* 1(2): 335-359. (Proceeding)
- Runturambi, A. J. S. and P. Waterpauw (2022). "Ketahanan Sosial Budaya Dan Pembangunan Papua Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(10): 15867-15881. (Jurnal Online)
- Sitorus, Y. L. M. (2018). "Kehidupan Orang Asli Papua di Distrik Tiom setelah Pemekaran Kabupaten Lanny Jaya." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. (Jurnal Online)
- Suriadin, S. (2022). "Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 14(2): 86-97. (Jurnal Online)
- Tabuni, D., et al. (2016). "Implementasi kebijakan otonomi khusus (studi kasus tentang pelayanan publik bidang pendidikan) di Kabupaten Lanny Jaya provinsi Papua." *Jurnal Administrasi Publik* 1(043). (Jurnal Online)
- Wenda, E. (2015). "Implementasi Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik Bidang Kesehatan (suatu Studi di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua) 1." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 2(6): 1086. (Jurnal Online)
- Anisa Sopiah. (2023). *Hasil Bumi Dikeruk, Kemiskinan di Papua Malah Naik Tertinggi*. diakses pada tanggal 5 Mei 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230116123235-4-405742/hasil-bumi-dikeruk-kemiskinan-di-papua-malah-naik-tertinggi#:~:text=Kemiskinan%20di%20Papua%20naik%20,sebesar%20%2C02%20persen%20poin.> (Website)
- Wenda, E., et al. (2022). "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018-2021 (Analysis of Development Inequality and Economic Growth Between Regions Regency/City in Papua Province 2018-2021)." *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan)* 4(3): 256-264. (Jurnal Online)
- Wenda, I., et al. (2017). "Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua." *Jurnal Eksekutif* 2(2). (Jurnal Online)
- Yusnanda, Y. (2022). *Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Pulau Di Indonesia Pada Tahun 2015-2019*, Universitas Negeri Padang. (Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian, dan Disertsi).